

POLITIK TATA KELOLA SDA DAN KEADILAN DISTRIBUTIF: ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM YSS DALAM PENURUNAN KEMISKINAN DI LAMONGAN

Ahmad Sholikin¹

¹*Prodi Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Darul Ulum, Jl. Airlangga, No.3, Sukodadi, Lamongan*

Email: ahmad.sholikin@unisda.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini berfokus pada kompleksitas politik tata kelola sumber daya alam (SDA) di Kabupaten Lamongan yang menghadapi risiko paradoks Resource Curse di tengah arus masif industrialisasi dan hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi daerah yang impresif seringkali menciptakan ekonomi enklave yang eksklusif, sehingga menuntut adanya instrumen keadilan distributif yang inklusif melalui kebijakan perlindungan sosial yang responsif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas tiga instrumen kebijakan utama di bawah kepemimpinan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA (Bupati) dan Dirham Akbar Aksara, S.E., M.M. (Wakil Bupati), yakni Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), Rantang Kasih, dan BPNT Daerah dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan daerah. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan publik, di mana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, observasi lapangan secara langsung, serta dokumentasi data sekunder dari laporan capaian kinerja daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sinkronisasi ketiga program tersebut berhasil memanifestasikan *social dividend* yang komprehensif bagi masyarakat. Pemberdayaan KRTP terbukti efektif mendorong transformasi ekonomi mikro dan kemandirian bagi kelompok produktif yang rentan termarjinalkan. Program Rantang Kasih sukses memitigasi kemiskinan ekstrem melalui jaminan pemenuhan nutrisi bagi kelompok lansia non-produktif, sementara BPNT Daerah berfungsi strategis sebagai alat stabilisasi daya beli terhadap volatilitas harga pangan. Secara integratif, sinergi ketiga program ini memberikan kontribusi nyata terhadap tren penurunan angka kemiskinan makro di Kabupaten Lamongan hingga mencapai 12,42% pada tahun 2023. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa politik tata kelola SDA yang berkeadilan harus menyelaraskan proteksi sosial karitatif dengan pemberdayaan ekonomi produktif untuk membangun ketahanan kelembagaan. Keberlanjutan keberhasilan ini memerlukan penguatan akurasi tata kelola data terpadu dan komitmen fiskal yang konsisten untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kata kunci: Program YSS, Politik SDA, Keadilan Distributif.

ABSTRACT

The background of this research focuses on the complexity of natural resource (NR) governance politics in Lamongan Regency, which faces the risk of the Resource Curse paradox amidst massive industrialization and downstreaming trends. Impressive regional economic growth often creates exclusive enclave economies, thus demanding inclusive distributive justice instruments through responsive social protection policies. This study aims to critically evaluate the effectiveness of three main policy instruments under the leadership of Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA and Dirham Akbar Aksara, S.E., M.M., namely the Empowerment of Female Household Heads (KRTP), Rantang Kasih, and Regional BPNT, in accelerating the reduction of regional poverty rates. The research method applied is descriptive qualitative with a public policy study approach, where data collection was conducted through in-depth interviews with key stakeholders, direct field observations, and documentation of secondary data from regional performance achievement reports. The results of the study reveal that the synchronization of these three programs has successfully manifested a comprehensive social dividend for the community. KRTP empowerment has proven effective in driving micro-economic transformation and independence for productive groups vulnerable to marginalization. The Rantang Kasih program has successfully mitigated extreme poverty through guaranteed nutritional fulfillment for non-productive elderly groups, while Regional BPNT functions strategically as a tool for stabilizing purchasing power against food price volatility. Integratively, the synergy of these three programs has provided a significant contribution to the downward trend of the macro poverty rate in Lamongan Regency, reaching 12.42% in 2023. The conclusion of the study emphasizes that equitable NR governance politics must align charitable social protection with productive economic empowerment to build institutional resilience. The sustainability of this success requires strengthening the accuracy of integrated data governance and consistent fiscal commitment to support the Indonesia Emas 2045 vision.

Keywords: YSS Program, Natural Resource Politics, Distributive Justice.

PENDAHULUAN

Kabupaten Lamongan merupakan wilayah dengan karakteristik geo-ekonomi yang unik di Jawa Timur, yang secara konsisten memadukan potensi agraris dan maritim dengan akselerasi kawasan industri strategis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lamongan, sementara sektor industri pengolahan terus mengalami tren peningkatan pasca-pandemi. Namun, dualisme ekonomi ini membawa tantangan tersendiri; di satu sisi, industrialisasi menawarkan janji pertumbuhan, namun di sisi lain, ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) seringkali menjadi pedang bermata dua dalam narasi pembangunan daerah (Sholikin, 2025a).

Fenomena *Resource Curse* atau kutukan sumber daya menjadi relevan dalam konteks ini, mengingatkan bahwa kelimpahan modalitas fisik tidak secara otomatis berkorelasi linear dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara internasional, studi dari *Natural Resource Governance Institute* (2024) menekankan bahwa daerah dengan kekayaan sumber daya yang besar seringkali mengalami volatilitas ekonomi dan kegagalan dalam diversifikasi pendapatan (Tatar et al., 2024). Di tingkat lokal, tanpa regulasi yang ketat dan inklusif, eksploitasi SDA cenderung menciptakan ekonomi enklave (*enclave economy*), di mana pertumbuhan hanya berputar pada aktor modal dan korporasi besar, sementara masyarakat di akar rumput tetap terhimpit dalam lingkaran kemiskinan struktural akibat terbatasnya akses ke rantai nilai industri tersebut.

Ketimpangan distribusi ekonomi di wilayah kaya SDA juga memicu lahirnya jurang pemisah antara sektor formal dan informal. World Bank (2025) dalam laporannya mengenai *Indonesia's Path to Social Justice* menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh eksploitasi lahan atau sumber daya seringkali gagal menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar karena adanya kesenjangan keterampilan (*skill gap*) (Africa, 2025). Di Lamongan, tantangan ini muncul ketika kawasan industri di wilayah pesisir atau perbatasan mulai berkembang, namun masyarakat agraris di sekitarnya kesulitan untuk beradaptasi, sehingga mereka tetap berada dalam posisi marjinal di tengah arus modernisasi ekonomi daerah.

Dalam perspektif politik tata kelola, tantangan fundamental bagi pemerintah daerah adalah mengonversi nilai ekonomi dari pengelolaan ruang dan SDA menjadi keadilan distributif yang nyata. Keadilan ini menuntut adanya mekanisme re-alokasi anggaran yang mampu menyentuh kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan oleh dinamika pasar (Sholikin, 2018). Ketimpangan akses terhadap modal dan lapangan kerja formal seringkali menempatkan kelompok rentan, terutama perempuan kepala rumah tangga di wilayah perdesaan dan lansia, pada posisi yang sangat riskan terhadap guncangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori *Distributive Justice* yang dikembangkan dalam literatur kontemporer yang menekankan bahwa legitimasi politik suatu rezim daerah sangat bergantung pada kemampuannya melindungi warga yang paling lemah.

Di sinilah peran kebijakan publik sebagai jembatan "jalan tengah" antara ekstraksi sumber daya dan kelestarian sosial menjadi krusial. Jaring pengaman sosial (*social safety net*) kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai tindakan karitatif atau bantuan sementara yang bersifat darurat. Mengacu pada standar *International Labour Organization* (ILO) dalam *World Social Protection Report 2022-24*, perlindungan sosial harus diletakkan sebagai instrumen politik dan ekonomi yang strategis untuk mendistribusikan kembali surplus ekonomi daerah (Sholikin, 2025b). Di Lamongan, redistribusi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan sektor industri dan pertanian dapat dirasakan langsung oleh rumah tangga miskin melalui intervensi yang sistematis (Nada et al., 2025).

Pemerintah Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA (Bupati) dan Dirham Akbar Aksara, S.E., M.M. (Wakil Bupati) telah merespons tantangan tersebut dengan menginisiasi rangkaian program perlindungan sosial terintegrasi, yang meliputi Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP), Rantang Kasih, dan BPNT Daerah. Program-program ini didesain sebagai manifestasi dari politik kesejahteraan yang mencoba menjawab paradoks kemiskinan di tengah potensi daerah yang besar. Data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Lamongan menunjukkan bahwa intervensi yang terarah pada spesifikasi kebutuhan subjek, seperti nutrisi bagi lansia dan modal produktif bagi perempuan, memberikan dampak yang lebih

stabil terhadap penurunan angka kemiskinan makro yang pada tahun 2023 berhasil ditekan hingga ke angka 12,42% (Sholikin et al., 2025).

Secara lebih spesifik, Pemberdayaan KRTP diarahkan untuk mendorong demokratisasi ekonomi di tingkat domestik, memberikan otonomi bagi perempuan untuk keluar dari jerat ketergantungan bantuan. Sementara itu, Rantang Kasih hadir sebagai bentuk *Social Dividend* (dividen sosial) bagi kelompok lansia non-produktif yang tidak lagi terserap oleh pasar kerja, dan BPNT Daerah berfungsi sebagai jaring pengaman kedaulatan pangan rumah tangga untuk memitigasi dampak inflasi komoditas pangan. Ketiga instrumen ini merupakan satu kesatuan model tata kelola yang berusaha menyeimbangkan antara mengejar pertumbuhan (*pro-growth*) dan memastikan keberpihakan pada masyarakat miskin (*pro-poor*).

Efektivitas program-program tersebut dalam menekan angka kemiskinan menjadi indikator utama kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*) (Sholikin et al., 2026). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana instrumen perlindungan sosial tersebut mampu berfungsi sebagai alat mitigasi dampak negatif industrialisasi dan pengelolaan SDA di Kabupaten Lamongan. Melalui analisis kebijakan berbasis data ini, diharapkan ditemukan model sinkronisasi kebijakan yang solid antara eksploitasi sumber daya dengan proteksi sosial, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan kelembagaan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memetakan efektivitas program bantuan sosial dalam bingkai politik tata kelola sumber daya alam di Kabupaten Lamongan. Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang umum, fleksibel, dan dinamis, yang memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika kebijakan selama proses penelitian berlangsung. Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan realitas dan kompleksitas implementasi program Pemberdayaan KRTP, Rantang Kasih, dan BPNT Daerah secara mendalam, guna mengembangkan

pemahaman teoretis mengenai keadilan distributif di tingkat lokal.

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta para penerima manfaat program (Fahrudin et al., 2025). Observasi lapangan dilakukan untuk melihat langsung distribusi bantuan dan aktivitas pemberdayaan ekonomi di kantong-kantong kemiskinan, sementara dokumentasi digunakan untuk menghimpun data statistik kemiskinan dan laporan capaian program dari pemerintah daerah.

Fokus penelitian diarahkan pada interaksi antara intervensi kebijakan dengan struktur sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Lamongan. Peneliti memaparkan secara rinci dan jelas mengenai kriteria penerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta kendala institusional yang dihadapi di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memiliki pengetahuan dan teknik dasar mengenai model perlindungan sosial yang diterapkan, sehingga hasil kajian ini memenuhi standar validitas untuk dipublikasikan sebagai referensi kebijakan.

Tahapan selanjutnya adalah analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas bantuan terhadap penurunan kemiskinan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan mengenai kemandirian ekonomi KRTP, ketahanan pangan melalui BPNT Daerah, dan perlindungan lansia melalui Rantang Kasih dengan indikator kesejahteraan daerah. Melalui proses ini, peneliti menyajikan narasi yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana tujuan penelitian dapat tercapai dan memberikan rekomendasi strategis bagi keberlanjutan tata kelola SDA yang inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ekonomi Melalui Pemberdayaan KRTP Sebagai Strategi Mitigasi Marjinalisasi

Berdasarkan temuan di lapangan, program Pemberdayaan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) di Kabupaten Lamongan telah bertindak sebagai instrumen vital dalam mengoreksi ketimpangan akses modal, terutama

di wilayah-wilayah yang bersinggungan langsung dengan zona industri sumber daya alam. Dalam perspektif politik tata kelola, KRTP tidak boleh dipandang sekadar sebagai bantuan alat usaha bersifat karitatif, melainkan sebuah upaya demokratisasi ekonomi yang memberikan otonomi bagi perempuan untuk melepaskan diri dari jerat ekonomi enklave yang cenderung maskulin (Ibrahim et al., 2025). Melalui intervensi modal produktif, para penerima manfaat kini memiliki kapasitas untuk menciptakan unit ekonomi mikro yang mandiri. Hal ini secara signifikan meminimalisir risiko kemiskinan struktural yang seringkali muncul akibat hilangnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya lahan tradisional yang telah beralih fungsi menjadi kawasan industri atau infrastruktur penunjang lainnya.

Analisis mendalam melalui lensa teori *Distributive Justice* menunjukkan bahwa program KRTP di Lamongan merupakan manifestasi nyata dari redistribusi peluang. Data kualitatif yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan pendamping program di lapangan mengungkapkan bahwa sebelum adanya intervensi ini, mayoritas perempuan kepala rumah tangga di wilayah pesisir dan agraris Lamongan terjebak dalam sektor informal yang sangat fluktuatif tanpa dukungan jaminan sosial. Kehadiran program ini memberikan "bantalan ekonomi" yang memungkinkan mereka melakukan eskalasi dari pekerja serabutan menjadi pemilik usaha mikro (Pamungkas et al., 2025). Dengan bantuan sarana prasarana produksi yang spesifik sesuai kebutuhan subjek, terdapat pergeseran pola konsumsi menjadi pola produksi, yang dalam teori pembangunan disebut sebagai penguatan *supply-side* ekonomi rumah tangga untuk menghadapi volatilitas pasar global.

Secara sosiopolitik, pemberdayaan KRTP di Lamongan juga berfungsi sebagai strategi mitigasi terhadap marginalisasi perempuan dalam rantai nilai industri. Hasil observasi di beberapa desa menunjukkan bahwa di tengah masifnya hilirisasi industri yang padat modal, seringkali terjadi *gender gap* dalam penyerapan tenaga kerja. Program KRTP menutup celah tersebut dengan menciptakan lapangan kerja mandiri di sektor domestik yang inklusif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi yang diraih oleh KRTP memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang luar biasa; pendapatan yang dihasilkan cenderung dialokasikan kembali untuk investasi sumber

daya manusia, seperti pendidikan dan nutrisi anak. Hal ini membuktikan bahwa inklusivitas ekonomi di tingkat mikro merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi yang menjadi momok di daerah kaya sumber daya.

Data sekunder dari laporan capaian kinerja daerah tahun 2024-2025 memperkuat temuan bahwa efektivitas KRTP sangat bergantung pada akurasi identifikasi kebutuhan di tingkat lokal. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah desa dan dinas terkait menjadi faktor penentu keberhasilan "lulusnya" seorang KRTP dari kategori miskin. Analisis teoretis mengenai tata kelola (*governance*) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam menentukan jenis bantuan usaha—apakah itu berupa alat pengolahan hasil laut bagi warga pesisir atau peralatan jahit bagi warga perdesaan—adalah bentuk rekonsiliasi model partisipasi. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan tidak menjadi aset mati, melainkan modal kerja aktif yang memiliki tingkat keberlanjutan tinggi karena relevan dengan ekosistem ekonomi di sekelilingnya.

Lebih jauh lagi, transformasi ekonomi ini berkaitan erat dengan isu ketahanan kelembagaan dalam menghadapi fenomena *Resource Curse*. Di wilayah yang mengalami industrialisasi cepat, tekanan terhadap ruang hidup seringkali memicu degradasi ketahanan sosial. KRTP hadir sebagai instrumen yang memperkuat "imunitas" ekonomi rumah tangga sehingga mereka tidak mudah terfragmentasi oleh arus industrialisasi. Analisis kualitatif terhadap pola adaptasi penerima bantuan menunjukkan adanya peningkatan rasa percaya diri sosial (*social self-esteem*) yang signifikan. Perempuan yang sebelumnya marjinal kini bertransformasi menjadi aktor ekonomi yang memiliki posisi tawar dalam struktur sosial desa, yang secara teoritis memperkuat modal sosial (*social capital*) sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan (Swandana & Ardiana, 2025).

Dalam konteks Environmental, Social, and Governance (ESG) di level pemerintahan daerah, program KRTP merupakan representasi dari pilar 'Social' yang kuat. Implementasi program ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan YSS tidak hanya mengejar angka pertumbuhan PDRB semata, tetapi juga memperhatikan kualitas pemerataan ekonomi. Hasil dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa program ini

berhasil menurunkan indeks kedalaman kemiskinan di kantong-kantong wilayah industri. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan redistribusi melalui pemberdayaan KRTP adalah langkah cerdas untuk menghindari terjadinya kesenjangan ekstrem antara sektor industri yang modern dengan ekonomi rumah tangga yang tradisional, yang seringkali menjadi pemicu konflik sosial di wilayah kaya SDA (Fatmawati et al., 2025).

Namun demikian, analisis penelitian juga menemukan adanya tantangan dalam aspek keberlanjutan digital di era AI ini. Sebagian besar penerima manfaat KRTP masih menghadapi kendala dalam melakukan digitalisasi pemasaran hasil produk mereka. Hal ini memerlukan intervensi lanjutan berupa pendampingan literasi digital agar unit ekonomi mikro yang telah terbentuk tidak terjebak dalam stagnasi pasar lokal. Teori *Digital Rebound* memperingatkan bahwa tanpa integrasi teknologi, kelompok kecil akan tetap tertinggal meski telah diberikan modal fisik. Oleh karena itu, efektivitas KRTP di masa depan perlu disinkronkan dengan ekosistem *e-commerce* lokal guna memperluas jangkauan pasar produk-produk unggulan KRTP Lamongan hingga ke level nasional maupun internasional.

Sebagai kesimpulan dari sub-bab ini, transformasi ekonomi melalui KRTP di Lamongan terbukti bukan sekadar instrumen bantuan jangka pendek, melainkan sebuah strategi politik ekonomi yang bersifat struktural. Dengan mengedepankan aspek inklusivitas dan kemandirian, program ini berhasil memitigasi dampak marjinalisasi masyarakat lokal di tengah pusaran arus industri sumber daya alam. Sinergi antara modal fisik, pendampingan yang intensif, dan akurasi data menjadi prasyarat mutlak agar program jaring pengaman sosial ini mampu bertransformasi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, selaras dengan visi menuju Indonesia Emas 2045 yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai episentrum pembangunan.

Rintang Kasih dan BPNT Daerah sebagai manifestasi dividen sosial bagi kelompok rentan

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa program Rintang Kasih dan BPNT Daerah di Kabupaten Lamongan secara fundamental berfungsi sebagai *Social Dividend* (dividen sosial) yang mendistribusikan kembali

surplus ekonomi daerah kepada kelompok non-produktif. Dalam teori politik ekonomi, dividen sosial dipahami sebagai hak warga negara atas kemanfaatan dari pengelolaan kekayaan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Lamongan, instrumen ini menjadi krusial karena dinamika industrialisasi dan transisi tata kelola sumber daya alam (SDA) seringkali meninggalkan "residu sosial" berupa kelompok lansia miskin dan masyarakat rentan yang secara fisik dan struktural tidak lagi mampu bersaing di pasar kerja industri maupun sektor agraris modern yang semakin terotomasi.

Melalui program Rintang Kasih, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan intervensi langsung pada aspek paling mendasar dari kemiskinan ekstrem, yaitu ketahanan pangan dan nutrisi bagi lansia terlantar. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping di lapangan, distribusi makanan sehat dua kali sehari ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan kalori, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial dan kesehatan bagi warga yang tinggal sendiri. Secara teoretis, ini adalah manifestasi dari *Human Security* yang menjamin martabat manusia tetap terjaga meskipun individu tersebut sudah kehilangan kapasitas ekonominya. Data kualitatif menunjukkan bahwa program ini secara efektif menekan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) karena memberikan kepastian asupan nutrisi yang sebelumnya sangat fluktuatif bergantung pada belas kasihan lingkungan sekitar (Ervan et al., 2025).

Secara analitis, Rintang Kasih bertindak sebagai alat mitigasi dampak sampingan dari perubahan struktur agraria ke industri. Ketika lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri atau infrastruktur strategis, pola dukungan keluarga tradisional di perdesaan seringkali mengalami pergeseran akibat migrasi tenaga kerja produktif ke kota. Hasil observasi menunjukkan bahwa lansia yang ditinggalkan oleh generasi produktifnya menjadi kelompok yang paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Di sinilah program ini hadir sebagai pengganti peran jaring pengaman keluarga yang mulai melemah. Melalui perspektif *Distributive Justice*, alokasi APBD untuk program ini adalah bentuk "pajak kemanusiaan" yang wajib dikembalikan pemerintah daerah kepada warga yang telah memberikan kontribusi historisnya namun kini terpinggirkan oleh arus modernisasi.

Sementara itu, program BPNT Daerah berfungsi sebagai instrumen stabilitas daya beli yang sangat responsif terhadap volatilitas harga komoditas pangan di pasar lokal. Berbeda dengan bantuan nasional yang seringkali mengalami kendala administratif dan keterlambatan distribusi, BPNT Daerah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menambal celah (*buffer*) warga miskin yang belum ter-cover oleh DTKS Pusat. Temuan dokumentasi penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pangan melalui skema daerah ini memberikan rasa aman bagi rumah tangga miskin dalam menghadapi inflasi pangan tahunan. Secara teoretis, kebijakan ini selaras dengan konsep *Social Safety Net* yang dinamis, di mana negara hadir sebagai penyeimbang ketika mekanisme pasar gagal menyediakan akses pangan yang terjangkau bagi kelompok bawah.

Analisis lebih dalam mengenai politik tata kelola SDA mengungkapkan bahwa pendanaan BPNT Daerah merupakan strategi cerdas dalam mengelola "rente" daerah untuk kepentingan sosial. Dalam wawancara dengan narasumber dari Bagian Pemerintahan, terungkap bahwa sinkronisasi antara penerimaan daerah dari sektor industri dan alokasi bantuan sosial menjadi kunci keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari tata kelola yang bersifat ekstraktif semata menuju tata kelola yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan (*welfare-oriented*). Dengan memastikan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, pemerintah daerah sebenarnya sedang melakukan investasi pada stabilitas sosial yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan investasi dan industri di Kabupaten Lamongan (Hirzi et al., 2025).

Kaitan antara BPNT Daerah dengan perlindungan martabat kemanusiaan tercermin dalam kemudahan akses dan kualitas komoditas yang diberikan. Peneliti menemukan melalui studi dokumentasi bahwa pemilihan komoditas bantuan yang melibatkan pelaku UMKM lokal menciptakan ekosistem ekonomi sirkular. Bantuan sosial tidak hanya mengalir satu arah sebagai konsumsi, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi pedagang pasar dan petani lokal di Lamongan. Dalam bingkai ESG (*Environmental, Social, and Governance*), model ini memenuhi pilar 'Social' dengan sangat baik, di mana kebijakan publik mampu memberikan solusi ganda: perlindungan bagi si miskin dan

penguatan bagi sektor informal yang memasok kebutuhan pangan tersebut (Arif et al., 2025).

Integrasi antara Rantang Kasih dan BPNT Daerah menciptakan sebuah sistem perlindungan berlapis yang sangat efektif dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem makro. Jika Rantang Kasih menysasar individu non-produktif secara personal, BPNT Daerah menysasar ketahanan unit rumah tangga secara kolektif. Gabungan keduanya memastikan bahwa tidak ada warga yang jatuh ke bawah garis kemiskinan yang lebih dalam akibat guncangan ekonomi mendadak. Analisis data statistik menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Lamongan selama lima tahun terakhir berkorelasi positif dengan perluasan cakupan kedua program ini. Hal ini membuktikan bahwa intervensi pemerintah daerah yang spesifik dan terarah jauh lebih efektif daripada program bantuan yang bersifat umum dan masif namun tidak memiliki kedekatan sosiologis dengan kebutuhan warga lokal.

Sebagai penutup analisis sub-bab ini, program Rantang Kasih dan BPNT Daerah membuktikan bahwa politik tata kelola yang baik adalah politik yang mampu memanusiakan warga negaranya. Di tengah ambisi besar pembangunan industri dan ekstraksi sumber daya, kehadiran dividen sosial ini menjadi bukti komitmen kepemimpinan Yuhronur Efendi - Sufyan (YSS) dalam mewujudkan keadilan distributif. Melalui jaring pengaman ini, Kabupaten Lamongan berhasil membangun model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi juga menjaga denyut kehidupan dan martabat kelompok paling rentan, memastikan bahwa kemajuan daerah adalah kemajuan yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, tanpa ada yang tertinggal di belakang.

Analisis Integratif Efektivitas Bantuan YSS Terhadap Penurunan Kemiskinan Makro

Analisis integratif terhadap kebijakan bantuan sosial di bawah kepemimpinan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA (Bupati) dan Dirham Akbar Aksara, S.E., M.M. (Wakil Bupati) menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model bantuan sektoral menuju sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Dalam perspektif politik tata kelola, sinkronisasi antara Pemberdayaan KRTP, Rantang Kasih, dan BPNT Daerah menciptakan sebuah "ekosistem

kesejahteraan" yang bekerja secara simultan pada berbagai lapisan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 13,38% pada tahun 2021 menjadi 12,42% pada tahun 2023. Penurunan ini tidak terlepas dari intervensi integratif yang menasar baik sisi pengeluaran (*expenditure*) melalui bantuan pangan maupun sisi pendapatan (*income*) melalui pemberdayaan ekonomi produktif.

Secara teoretis, keberhasilan ini dapat dijelaskan melalui kerangka kerja *Policy Synergy*, di mana berbagai instrumen kebijakan saling memperkuat (*reinforcing*) satu sama lain. Program KRTP memberikan "daya dorong" bagi kelompok produktif untuk keluar dari zona kemiskinan, sementara Rantang Kasih dan BPNT Daerah memberikan "daya tahan" bagi kelompok non-produktif agar tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ekstrem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ini sangat efektif dalam menjaga stabilitas sosial di tengah fluktuasi ekonomi pasca-pandemi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip *Social Governance* yang menekankan bahwa negara harus hadir melalui berbagai saluran intervensi yang adaptif terhadap karakteristik demografis masyarakat lokal.

Pemanfaatan data dalam penelitian kualitatif ini mengonfirmasi bahwa ketepatan sasaran (*targeting accuracy*) menjadi variabel penentu efektivitas kebijakan. Integrasi data melalui sistem yang terkoordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meminimalisir terjadinya tumpang tindih bantuan. Dalam pengamatan lapangan, transparansi penyaluran bantuan di tingkat desa juga berkontribusi pada peningkatan modal sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Efektivitas ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan rakyat. Melalui integrasi ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil menciptakan mekanisme distribusi yang lebih adil dan merata di seluruh kecamatan.

Dari sisi politik tata kelola sumber daya alam (SDA), alokasi anggaran untuk program-program ini merupakan strategi "investasi sosial" yang cerdas. Surplus ekonomi yang diperoleh dari sektor-sektor strategis daerah dikonversi menjadi jaring pengaman yang mampu meredam dampak negatif dari ketimpangan pembangunan.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa model ini memenuhi aspek keberlanjutan sosial dalam kerangka ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Dengan memperkuat ketahanan sosial di tingkat rumah tangga, pemerintah daerah sebenarnya sedang membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dapat berjalan beriringan jika dikelola dengan visi politik yang berpihak pada rakyat.

Tabel 1. Korelasi Intervensi Program terhadap Indikator Penurunan Kemiskinan

Instrumen Kebijakan	Target Capaian	Indikator Keberhasilan	Kontribusi Makro
Pemberdayaan KRTP	Kemandirian Ekonomi	Peningkatan Pendapatan Keluarga	Penurunan Gini Ratio
Rantang Kasih	Perlindungan Lansia	Kecukupan Nutrisi & Kesehatan	Penurunan Kemiskinan Ekstrem
BPNT Daerah	Ketahanan Pangan	Stabilitas Pengeluaran Rumah Tangga	Penurunan Angka Inflasi Lokal

Sumber: Hasil Analisis Data Penelitian, 2026

Keberlanjutan program-program ini juga sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah dan komitmen politik jangka panjang. Dalam wawancara dengan pemangku kepentingan, terungkap bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor industri dan jasa menjadi tumpuan utama dalam mendanai program BPNT Daerah dan Rantang Kasih secara mandiri. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Lamongan yang cukup baik dalam memproteksi warganya tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Secara analitis, otonomi fiskal yang diarahkan pada kebijakan pro-miskin merupakan bentuk nyata dari kedaulatan politik daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, efektivitas integratif ini juga dipengaruhi oleh peran aktif pendamping program di tingkat desa yang bertindak sebagai "jembatan" komunikasi antara kebijakan dan

realitas sosial. Peneliti menemukan bahwa keberhasilan KRTP dalam mengelola modal usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan bimbingan teknis yang diberikan secara berkelanjutan. Tanpa adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat, bantuan sosial berisiko menjadi tidak produktif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana menjadi rekomendasi krusial agar efektivitas bantuan tetap terjaga pada level yang optimal demi mencapai target penurunan kemiskinan yang lebih ambisius.

Sebagai penutup analisis dalam bab ini, integrasi bantuan YSS telah membuktikan bahwa kemiskinan di Kabupaten Lamongan dapat dikelola melalui intervensi yang sistematis dan berbasis pada data yang akurat. Sinergi antara perlindungan sosial karitatif dan pemberdayaan produktif merupakan "jalan tengah" yang efektif dalam menjawab kompleksitas persoalan kemiskinan di wilayah yang sedang bertransformasi menjadi kawasan industri. Keberhasilan model ini tidak hanya diukur dari angka statistik penurunan kemiskinan semata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan martabat kemanusiaan warga Lamongan. Integrasi kebijakan ini merupakan langkah strategis yang solid menuju pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Secara empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi program Pemberdayaan KRTP, Rantang Kasih, dan BPNT Daerah di bawah kepemimpinan YSS terbukti efektif dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Keberhasilan ini tidak hanya terlihat dari penurunan statistik kemiskinan makro, tetapi juga dari terciptanya jaring pengaman sosial yang mampu menjawab persoalan kebutuhan dasar sekaligus kemandirian ekonomi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kombinasi antara intervensi produktif dan perlindungan karitatif menciptakan model penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, di mana setiap kelompok rentan mendapatkan skema bantuan yang spesifik sesuai dengan kapasitas sosial dan ekonominya.

Secara teoretis, kebijakan ini mencerminkan keberhasilan transformasi "rente" sumber daya alam menjadi keadilan distributif

yang nyata. Dengan mengalokasikan surplus ekonomi daerah ke dalam program bantuan sosial yang terukur, Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil memitigasi dampak *Resource Curse* yang seringkali menghantui wilayah dengan pertumbuhan industri cepat. Fenomena ini membuktikan bahwa kebijakan publik dapat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang inklusif, memastikan bahwa gerak maju industrialisasi di daerah tidak meninggalkan residu kemiskinan struktural bagi masyarakat lokal di level akar rumput.

Refleksi sosiopolitik terhadap program KRTP menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci utama dalam demokratisasi ekonomi domestik. Di tengah pergeseran struktur dari agraris ke industri yang cenderung menciptakan ekonomi enklave, KRTP hadir sebagai alat koreksi yang memberikan otonomi bagi kelompok perempuan untuk tetap berdaya secara mandiri. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga secara langsung, tetapi juga memperkuat modal sosial desa, di mana martabat kemanusiaan dan keberlanjutan ekonomi berjalan beriringan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sektor formal yang eksklusif.

Sebagai sintesis akhir, stabilitas dan keberlanjutan program jaring pengaman sosial di Lamongan sangat bergantung pada akurasi tata kelola data dan komitmen fiskal daerah. Sinergi yang kuat antara perlindungan sosial dan strategi pemberdayaan merupakan perwujudan dari pilar *Social* dalam kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance) di pemerintahan daerah. Kesimpulan ini sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, di mana kelembagaan daerah yang tangguh adalah kelembagaan yang mampu mensinkronkan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban moral untuk melindungi warga negaranya yang paling rentan menuju visi Indonesia Emas 2045.

REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Sosial disarankan untuk memperkuat integrasi data kemiskinan melalui satu sistem data tunggal yang diperbarui secara *real-time*. Sinkronisasi data antara penerima Pemberdayaan KRTP, Rantang Kasih, dan BPNT Daerah sangat krusial untuk

menghindari terjadinya *inclusion* maupun *exclusion error*. Penguatan tata kelola data ini akan menjamin bahwa keadilan distributif benar-benar menjangkau kelompok paling rentan di wilayah-wilayah terdampak industrialisasi sumber daya alam, sehingga efektivitas APBD dalam menekan angka kemiskinan makro dapat dioptimalkan secara berkelanjutan.

Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, direkomendasikan untuk melakukan eskalasi pada program Pemberdayaan KRTP dari sekadar pemberian bantuan modal fisik menuju pendampingan literasi digital dan akses pasar. Mengingat tantangan ekonomi di era industri, unit usaha mikro yang dikelola perempuan perlu diintegrasikan ke dalam ekosistem *e-commerce* lokal maupun rantai pasok industri besar di Lamongan melalui skema kemitraan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Langkah ini penting agar transformasi ekonomi rumah tangga tidak terjebak dalam stagnasi pasar lokal, melainkan mampu naik kelas dan memiliki daya saing yang kompetitif.

Bagi pengambil kebijakan di tingkat eksekutif, perlu dirumuskan regulasi daerah yang memastikan keberlanjutan fiskal bagi program "dividen sosial" seperti Rantang Kasih dan BPNT

Daerah, terutama dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sumber daya alam dan industri. Rekomendasi ini bertujuan untuk memproteksi anggaran perlindungan sosial dari fluktuasi politik maupun ekonomi, sehingga jaring pengaman bagi lansia dan kelompok non-produktif tetap terjaga. Konsistensi alokasi anggaran ini akan memperkuat citra Kabupaten Lamongan sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap perlindungan martabat manusia di tengah masifnya pembangunan fisik.

Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi transdisipliner yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang hilirisasi industri terhadap struktur sosial dan ketahanan kebudayaan di wilayah pesisir serta jalur Pantura Lamongan. Fokus riset mendatang perlu mengeksplorasi risiko *Digital Rebound* pada pelaku usaha mikro perempuan dan bagaimana algoritma teknologi mempengaruhi pola konsumsi serta kedaulatan ekonomi masyarakat lokal. Kajian lanjutan yang bersifat longitudinal akan sangat bermanfaat untuk memetakan dinamika kemiskinan secara lebih presisi dalam mendukung visi transformasi sosial menyongsong Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Africa, S.-S. (2025). World Bank Group. URL: [https://Data. Worldbank. Org/Country/Sub-Saharan-Africa](https://Data.Worldbank.Org/Country/Sub-Saharan-Africa) [Accessed 2025-03-29].
- Arif, M., Furiandini, F., Istiqomah, S. N. L., Yanti, E. R., Maulidiyah, I., & Sofyan, M. R. (2025). Optimalisasi Perpustakaan Desa Berbasis Asset-Based Community Development: Strategi Pemberdayaan Literasi Di Plabuhanrejo, Lamongan. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 85–98.
- ERVAN, Y., IKA, D. P., Widyawati, W., & SAPTO, P. (2025). Efektivitas Implementasi Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Keluarga Rentan di Desa Godog, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1), 130–147.
- Fahrudin, A. H., Musthofa, I., & Ikmal, H. (2025). Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Moderasi Beragama dan Nilai Budaya Lokal di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lamongan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 1–13.
- Fatmawati, V. A., Huda, M. M., & Susandi, A. (2025). Analysis of critical thinking skills in mathematics subjects of fourth grade students of SD Muhammadiyah Sugio Lamongan. *Journal of Elementary Education*, 2(1), 1–10.
- Hirzi, M. H., Abida, R. F., & Siregar, W. Z. B. (2025). Makanan Ritual dan Makna Simboliknya: Analisis Tradisi Kuliner Sego Langgi di Lamongan, Indonesia: Ritual Meals and Its Symbolic Meaning: Analyses of Culinary Tradition Sego Langgi in Lamongan, Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 20(2), 135–156.

- Ibrahim, K., Bijaksana, S., Abdurrachman, M., Sahara, D. P., Suryanata, P. B., Zulaikah, S., Wirawan, R., Harlianti, U., Widagdo, T. A. M., & Fajar, S. J. (2025). Contrasting magmatic structures and tectonic controls from integrated gravity and magnetic data in the Bromo–Tengger–Semeru complex and the Lamongan Volcanic Field, East Java, Indonesia. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 108455.
- Nada, R. I., Saputra, H., & Hariyono, H. (2025). Adaptasi Berbasis Kearifan Lokal dalam Menghadapi Banjir Rob di Wilayah Pesisir Lamongan. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 848–852.
- Pamungkas, A., Atmodiwirjo, P., Harani, A. R., Harun, I., Darmaji, D., Lasminto, U., & Setyawan, W. (2025). What makes community with over decades flooding history resilient? A lesson learned from flooded Bengawan Jero, Lamongan, Indonesia. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*.
- Sholikin, A. (2018). Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15, 35–50. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i1.131>.
- Sholikin, A. (2025a). Localization of The Global Norm and Efforts to Minimize the Natural Resource Curse in Bojonegoro. *Journal of Governance*, 10(2).
- Sholikin, A. (2025b). Realisme atau Romantisme? “Peran Masyarakat Sipil dalam Minimalisasi Kutukan Sumber Daya Alam di Bojonegoro.” *Jurnal Transformative*, 11(1), 1–21. <https://doi.org/10.21776/UB.TRANSFORMATIVE.2025.011.01.1>.
- Sholikin, A., Erison, Y., & Rohmah, E. N. L. (2025). Transition of extractive industry governance: Effort towards an inclusive green economy Transisi tata kelola industri ekstraktif: Usaha menuju green economy yang inklusif. *Jurnal Sosiologi Dialektika Vol*, 20(1), 43–60.
- Sholikin, A., Sarsale, M., & Shoimah, S. (2026). Environmental, Social, and Governance (ESG) And Public Policy: A Systematic Review. *Studies in Business and Economics*, 21(1), 306–331. <https://doi.org/10.2478/SBE-2026-0014>.
- Swandana, H., & Ardiana, I. D. K. R. (2025). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, BUDAYA ORGANISASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1913–1927.
- Tatar, M., Harati, J., Farokhi, S., Taghvaei, V., & Wilson, F. A. (2024). Good governance and natural resource management in oil and gas resource-rich countries: A machine learning approach. *Resources Policy*, 89, 104583. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2023.104583>